

RAGAM WARNA DI BAWAH LANGIT TARAKAN: PAGUYUBAN, KERUKUNAN ETNIS DAN MEMORI KONFLIK

Millah Ananda Yunita^{1*}, Pawennari Hijjang¹, dan Muh. Nur Rahmat Yasim²

¹Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar.

²Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok.

*Corresponding author: millah.ananda.yunita.77@gmail.com

Abstract Artikel ini mengkaji peran strategis paguyuban lokal dalam memelihara harmoni sosial dan menangani dampak konflik antaretnis tahun 2010 di Tarakan, Indonesia, yang melibatkan etnis Bugis Letta dan Tidung. Konflik ini meninggalkan dampak mendalam dalam memori kolektif masyarakat dan terus memengaruhi hubungan sosial hingga saat ini. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Oktober 2022 hingga Januari 2023 menggunakan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan total sebanyak 10 orang. Fokus penelitian adalah pada kontribusi paguyuban seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP), Paguyuban Keluarga Warga Jawa (PAKUWAJA), dan Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dalam mendukung rekonsiliasi dan integrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paguyuban berfungsi sebagai mediator yang efektif, memfasilitasi kegiatan budaya dan inisiatif sosial yang memperkuat inklusivitas, toleransi, dan kepercayaan antaretnis. Dengan mendorong interaksi lintas budaya dan memperkuat komitmen bersama terhadap perdamaian, paguyuban berhasil meredakan ketegangan dan memperkuat kohesi sosial. Artikel ini menyoroti pentingnya peran mekanisme sosial lokal dalam resolusi konflik, membangun ketahanan komunitas, dan memelihara harmoni dalam masyarakat multikultural.

Keyword:

Paguyuban, kerukunan, multikulturalisme, Tarakan, konflik

Article Info

Received : 28 Feb 2025

Accepted : 17 Apr 2025

Published : 05 Jun 2025

1. Pendahuluan

Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara adalah kota multikultural yang memiliki karakteristik demografis kompleks dengan keberadaan berbagai kelompok etnis. Kota ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi penduduk asli suku Tidung, tetapi juga menampung pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Bugis, Banjar, Jawa, dan Tionghoa. Sebagai kota transit yang strategis, Tarakan memfasilitasi interaksi lintas etnis yang beragam, membentuk jaringan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkontribusi pada stabilitas kota.

Menurut (Mansouri & Lobo, 2020). fenomena multikultural seperti ini mencerminkan multietnisitas yang mendorong interaksi positif, meskipun rentan terhadap konflik ketika kepentingan antarkelompok tidak terfasilitasi dengan baik.

Multikulturalisme dalam konteks masyarakat modern bukan hanya soal keberagaman etnis yang hidup berdampingan, tetapi juga bagaimana negara mengakomodasi hak-hak setiap kelompok dalam sistem sosial dan politiknya. Seperti yang dijelaskan oleh (Kymlicka, 2002) bahwa multikulturalisme dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjamin hak-hak kelompok yang berbeda, termasuk masyarakat adat, kelompok nasional minoritas, dan komunitas imigran. Dalam pendekatan ini, masyarakat adat memerlukan pengakuan atas hak-hak mereka atas tanah, otonomi politik, serta perlindungan budaya dan bahasa. Kelompok nasional minoritas, seperti yang ditemukan di banyak negara dengan sejarah panjang multietnisitas, sering kali memerlukan pengakuan dalam bentuk otonomi wilayah dan hak bahasa resmi. Sementara itu, komunitas imigran menghadapi tantangan yang berbeda karena mereka masuk ke dalam masyarakat yang sudah mapan dan diharapkan dapat berintegrasi tanpa kehilangan identitas budayanya.

Di sisi lain, (Kymlicka, 2010) juga menyoroti bagaimana multikulturalisme telah berkembang dan menghadapi tantangan baru dalam beberapa dekade terakhir. Pada 1970-an hingga 1990-an, multikulturalisme menjadi pendekatan utama dalam banyak negara demokratis sebagai respons terhadap keberagaman etnis yang semakin kompleks. Namun, sejak pertengahan 1990-an, muncul resistensi terhadap kebijakan ini, terutama karena kekhawatiran bahwa multikulturalisme justru memperdalam segregasi sosial dan menghambat integrasi nasional. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang sebelumnya mengadopsi kebijakan multikulturalisme mulai menggeser fokusnya pada integrasi yang lebih ketat, menekankan pentingnya identitas nasional yang lebih homogen. Meskipun demikian, Kymlicka menegaskan bahwa tantangan ini tidak serta-merta meniadakan relevansi multikulturalisme, melainkan menuntut model yang lebih fleksibel dan mampu menyeimbangkan antara pengakuan identitas budaya dan kebutuhan akan kohesi sosial.

Kehadiran berbagai etnis di Tarakan telah lama menunjukkan bahwa masyarakat dapat hidup berdampingan, mengembangkan kerukunan melalui paguyuban dan lembaga adat yang berfungsi sebagai jembatan budaya. Fungsi paguyuban di Tarakan mirip dengan paguyuban masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat, yang memainkan peran penting dalam mempromosikan harmoni antarumat beragama dan antaretnis (Rachmadhani, 2018). Paguyuban di Tarakan menjadi wadah bagi setiap kelompok etnis untuk mempertahankan identitas budaya masing-masing sekaligus menjaga hubungan baik dengan komunitas lain melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Paguyuban seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP), Paguyuban Keluarga Warga Jawa (PAKUWAJA), dan Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) memainkan peran penting dalam mewujudkan stabilitas sosial di Tarakan, seiring dengan upaya pemerintah setempat dalam menekan potensi konflik antaretnis.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman yang ada juga memiliki potensi konflik. Hal ini terbukti dengan peristiwa konflik antaretnis pada tahun 2010 yang sempat mengguncang kota Tarakan. Konflik tersebut mencerminkan tantangan dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman, terutama dalam situasi di mana sumber daya atau kekuasaan menjadi isu sensitif. (Marta & Fernando, 2020) menyatakan bahwa konflik seperti ini sering kali dipicu oleh perasaan terpinggirkan atau ketidakadilan, yang mengarah pada stereotip negatif dan memperburuk hubungan antar kelompok. Meskipun demikian, konflik tersebut juga menjadi momentum penting bagi pemerintah dan komunitas lokal untuk meningkatkan dialog dan kolaborasi demi

mencegah terulangnya konflik yang serupa di masa mendatang. Pasca-konflik, paguyuban dan lembaga adat semakin memainkan peran krusial dalam menciptakan mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas yang bertujuan membangun solidaritas dan toleransi, seperti yang ditemukan dalam komunitas Tanèn Lanjâng di Madura yang berhasil mengelola kerukunan melalui pendekatan pendidikan sosial keagamaan (Majid & Amalina, 2020).

Dalam konteks Tarakan, pemerintah daerah juga mengadopsi kebijakan yang mendorong peran aktif lembaga adat dan paguyuban untuk mempromosikan harmoni sosial. Salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa lembaga adat wajib menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mendukung stabilitas di wilayah mereka. Berdasarkan peraturan ini, setiap lembaga adat diharapkan tidak hanya melestarikan adat dan budaya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menciptakan kerukunan melalui kegiatan lintas etnis yang terbuka bagi semua kelompok. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam program seperti “Jumpa Pagi,” yang melibatkan perwakilan dari setiap paguyuban, menunjukkan komitmen bersama untuk mempromosikan kohesi sosial melalui dialog reguler yang bertujuan memfasilitasi komunikasi langsung antarwarga.

Pengaruh kebijakan ini terlihat melalui berbagai acara budaya seperti Iraw Tengkeyu, yang mempertemukan komunitas etnis di Tarakan untuk merayakan warisan budaya bersama. Acara ini mencerminkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan paguyuban untuk menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural. Penelitian (Rachmadhani, 2018) menunjukkan bahwa inisiatif budaya serupa di Pontianak dapat memperkuat kohesi antaretnis melalui interaksi lintas budaya. Namun, penelitian tersebut lebih terfokus pada dimensi budaya sebagai sarana memperkuat kohesi sosial, tanpa membahas secara mendalam mekanisme formal yang melibatkan kebijakan pemerintah dan peran aktif lembaga adat atau paguyuban dalam mencegah konflik.

Kajian lain oleh (Majid & Amalina, 2020) menyoroti pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai agama untuk mendorong toleransi dan mengelola konflik di Madura. Meski relevan, penelitian ini terbatas pada pengaruh agama dalam konteks konflik tanpa menggali lebih jauh bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dengan pendekatan lintas budaya dan kebijakan formal. Sementara itu, (Lestari & Parihala, 2020) menguraikan pentingnya memori kolektif sebagai modal sosial dalam merawat perdamaian di Maluku. Penelitian tersebut menekankan nilai historis dalam membangun harmoni sosial pascakonflik, tetapi belum mengkaji bagaimana peran sinergis antara pemerintah dan komunitas dapat diterapkan secara strategis dalam konteks masyarakat multietnis.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi peran sinergis antara pemerintah, paguyuban, dan lembaga adat dalam menciptakan harmoni sosial di Tarakan pascakonflik antaretnis. Hal yang membedakan studi ini adalah pendekatannya yang mengintegrasikan tiga dimensi penting—budaya, agama, dan kebijakan—sebagai mekanisme resolusi konflik dan pencegahan konflik ulang. Tidak seperti penelitian sebelumnya, artikel ini memberikan gambaran konkret bagaimana kolaborasi lintas aktor dapat menciptakan stabilitas jangka panjang melalui kegiatan berbasis komunitas yang mendukung inklusivitas dan toleransi.

Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan diskusi tentang bagaimana kebijakan formal, seperti Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020, dapat diterjemahkan secara operasional melalui peran lembaga adat dan paguyuban. Dalam konteks Tarakan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan agama tidak hanya menjadi alat untuk meredakan konflik, tetapi juga menjadi dasar yang kokoh untuk membangun kohesi sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap dari penelitian terdahulu

tetapi juga memperkaya literatur tentang resolusi konflik berbasis komunitas dengan memberikan perspektif baru tentang pentingnya sinergi lintas sektor dalam masyarakat multikultural. Kontribusi teoritis dan praktis ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Lebih lanjut, pengaruh agama dan pendidikan sosial keagamaan juga menjadi aspek penting dalam membentuk nilai-nilai harmonis di kalangan masyarakat Tarakan. Sebagaimana yang diterapkan dalam masyarakat Tanèan Lanjâng di Madura, pendidikan berbasis nilai-nilai agama tidak hanya menanamkan nilai kekeluargaan dan toleransi tetapi juga menjadi mekanisme untuk mengelola konflik tanpa kekerasan (Majid & Amalina, 2020). Di Tarakan, peran agama dalam kehidupan sosial tidak terpisahkan dari upaya membangun kerukunan antaretnis, karena setiap paguyuban dan lembaga adat umumnya memiliki kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama-sama sebagai bentuk komitmen terhadap persatuan. Nilai-nilai agama dan budaya ini tercermin dalam praktik sehari-hari yang menekankan pentingnya saling menghargai dan toleransi, dua aspek kunci yang menopang stabilitas sosial di kota ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana paguyuban dan lembaga adat di Kota Tarakan berfungsi sebagai pilar kerukunan antaretnis melalui aktivitas sosial dan budaya, serta bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam mendukung upaya kerukunan tersebut. Dengan pendekatan etnografis, artikel ini akan mengungkap berbagai dinamika yang terjadi di lapangan dan menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan keharmonisan di tengah keberagaman. Kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam tentang mekanisme komunitas dalam menjaga kerukunan di masyarakat multikultural, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola keberagaman.

2. Metode

Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2022 hingga Januari 2023 di Kota Tarakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis metode etnografi untuk menggali dinamika kerukunan antaretnis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, mengamati pola interaksi sosial, serta memahami nilai dan norma budaya yang berperan dalam membentuk harmoni di lingkungan multietnis. Sebagaimana dijelaskan oleh Brewer (dalam Windiani & Rahmawati, 2016), etnografi merupakan pendekatan yang relevan dalam menggali makna serta aktivitas budaya suatu komunitas melalui pengumpulan data yang terstruktur. Dalam penelitian ini, metode ini memberikan peluang untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana masyarakat Tarakan membangun hubungan sosial di tengah keberagaman, serta bagaimana konflik masa lalu memengaruhi pola interaksi dan proses rekonsiliasi saat ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (1979), etnografi mampu mengungkap bagaimana suatu komunitas mengorganisasikan budayanya dalam pola pikir dan tindakan sehari-hari. Untuk menemukan itu, prosedur etnografi dalam penelitian ini berfokus pada cara komunitas memproses ingatan kolektif mereka serta bagaimana pengalaman konflik masa lalu diintegrasikan ke dalam identitas kolektif yang dimiliki. Proses ini dieksplorasi melalui keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti pertemuan paguyuban, ritual adat, dan festival budaya, termasuk Iraw Tengkyu yang menjadi salah satu momen penting dalam interaksi lintas etnis. Peneliti turut menghadiri dan mengamati bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam acara-acara tersebut serta bagaimana elemen budaya digunakan sebagai sarana membangun solidaritas. Dengan berada di dalam kehidupan sehari-hari komunitas, penelitian ini dapat menangkap dinamika sosial yang tidak selalu terlihat dalam interaksi formal,

termasuk bagaimana perasaan, memori kolektif, serta nilai-nilai budaya direproduksi dalam tindakan konkret.

Selain observasi partisipatif, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat, pengurus paguyuban, pemuka adat, serta pejabat pemerintah setempat untuk menggali lebih jauh persepsi mereka mengenai konsep kerukunan, strategi pemeliharaan harmoni, dan bagaimana pengalaman konflik 2010 masih berdampak dalam relasi sosial hingga saat ini. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan dari berbagai kelompok etnis yang ada di Tarakan. Melalui wawancara ini, penelitian dapat merekam narasi yang berkembang di antara kelompok masyarakat terkait ingatan kolektif mereka terhadap konflik serta bagaimana pengalaman tersebut dimaknai dalam kehidupan saat ini.

Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung kohesi sosial, termasuk Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan peran lembaga adat dalam menjaga persatuan serta menghindari potensi konflik. Artefak budaya seperti simbol-simbol paguyuban, pakaian adat, dan praktik sosial yang diperlihatkan dalam kegiatan budaya turut dianalisis untuk memahami bagaimana unsur-unsur tersebut berkontribusi dalam memperkuat identitas kolektif dan membangun kepercayaan antar kelompok etnis.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang diadaptasi dari teknik analisis data Creswell (2012). Langkah pertama dimulai dengan mengelola dan menyusun data dari hasil observasi, wawancara, serta studi literatur. Seluruh data ditranskrip, dikategorikan berdasarkan sumber informasi, dan disusun secara sistematis untuk mempermudah proses analisis lebih lanjut. Setelah data terkumpul, proses analisis dilanjutkan dengan tahap coding, yaitu mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam data berupa kutipan wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang relevan. Segmen-segmen data yang memiliki pola makna yang berulang kemudian dikelompokkan untuk menggambarkan tema utama yang muncul dalam penelitian ini.

Interpretasi data dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan, seperti konsep multikulturalisme, ingatan kolektif, dan resolusi konflik. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber juga dibandingkan satu sama lain untuk memastikan akurasi dan memperkuat kesimpulan yang diperoleh. Selain itu, refleksi terhadap konteks historis dan kultural yang mempengaruhi dinamika sosial di Tarakan turut menjadi bagian penting dalam analisis ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme sosial yang menopang harmoni antaretnis di kota ini.

Dengan menggunakan metode etnografi yang berorientasi pada keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial masyarakat, penelitian ini berupaya menangkap kompleksitas dinamika hubungan etnis di Tarakan secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih kaya terhadap bagaimana paguyuban dan lembaga adat tidak hanya berperan dalam mempertahankan identitas budaya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan, dialog, serta solidaritas antaretnis dalam kehidupan sosial sehari-hari.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan peran strategis paguyuban lokal dalam membangun serta mempertahankan harmoni sosial di Kota Tarakan, terutama pasca-konflik antar-etnis pada tahun 2010 yang melibatkan komunitas Bugis Letta dan Tidung. Temuan tersebut sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Rachmadhani, 2018) yang mengungkapkan bahwa paguyuban di Pontianak memiliki peranan signifikan dalam mempromosikan harmoni antar umat beragama

dan antar-etnis melalui interaksi budaya serta kolaborasi sosial. Namun demikian, penelitian ini menambahkan kontribusi dengan mendeskripsikan secara rinci bagaimana paguyuban seperti KKSS, LATUP, PAKUWAJA, dan PSMTI secara langsung bertindak sebagai mediator hubungan sosial, menyelenggarakan kegiatan budaya inklusif, serta mengelola memori kolektif tentang konflik guna memperkuat integrasi sosial.

Selain itu, penelitian ini relevan pula dengan temuan (Majid & Amalina 2020) yang menyoroti pentingnya pendidikan sosial-keagamaan dalam pengelolaan konflik di komunitas Tanèan Lanjâng, Madura. Kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada peranan paguyuban yang mengadopsi pendekatan inklusif serta aktivitas sosial untuk membangun toleransi. Namun, kajian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan bagaimana paguyuban di Tarakan tidak hanya menerapkan pendekatan berbasis agama, melainkan juga aktif terlibat dalam dialog lintas etnis serta penyelesaian konflik melalui kebijakan formal pemerintah daerah.

Selanjutnya, penelitian ini juga berkaitan erat dengan kajian oleh Lestari & Parihala (2020), yang menjelaskan bahwa memori kolektif dan identitas budaya berperan sebagai modal sosial penting dalam menjaga perdamaian pasca-konflik di Maluku. Kajian ini mendukung pandangan tersebut, sekaligus memperkaya diskusi dengan menyoroti peran praktis paguyuban dalam pengelolaan trauma kolektif melalui berbagai kegiatan budaya dan sosial, sehingga memori konflik dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran berharga guna mencegah konflik di masa depan. Namun, memori kolektif di Maluku tidak hanya berkuat pada pengalaman traumatis akibat konflik, tetapi juga mencakup mitos dan legenda tentang asal-usul kolektif berbagai suku bangsa yang membentuk identitas sosial bersama.

Konsep "*orang basudara*" menjadi contoh bagaimana narasi kolektif digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial di antara berbagai kelompok etnis di Maluku. Konsep ini telah lama tertanam dalam kesadaran masyarakat dan terus diperkuat melalui sistem adat seperti *pela-gandong*, yaitu ikatan persaudaraan antar desa yang melampaui batas etnis dan agama. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menghindari konflik, tetapi juga sebagai landasan bagi rekonsiliasi pasca-konflik. Selain itu, prinsip "*ale rasa, beta rasa*", yang menegaskan bahwa pengalaman satu kelompok harus dirasakan oleh kelompok lain sebagai bagian dari rasa kebersamaan, turut memperkuat struktur sosial yang mendukung pemulihan pasca-konflik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis mengenai sinergi antara peran paguyuban, lembaga adat, serta kebijakan formal pemerintah yang secara konkret berkontribusi menciptakan stabilitas sosial di Tarakan. Kajian ini menunjukkan bagaimana pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor lokal mampu menghasilkan mekanisme efektif dalam resolusi konflik berbasis komunitas, sekaligus menyediakan model praktis yang dapat diterapkan dalam menjaga harmoni sosial pada masyarakat multikultural lain di Indonesia.

3.1 Dinamika Multikultural dan Hubungan Antar Etnis di Kota Tarakan

Hasil penelitian ini mengungkapkan dinamika hubungan sosial yang kompleks di Kota Tarakan, yang menjadi pusat interaksi multi-etnis di Kalimantan Utara. Sebagai kota transit, Tarakan dihuni oleh beragam kelompok etnis, termasuk masyarakat asli suku Tidung dan berbagai komunitas pendatang seperti Bugis, Jawa, dan Tionghoa. Keberagaman ini menciptakan potensi besar untuk harmoni sosial, namun juga mengandung tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas, terutama pasca-konflik antaretnis yang pernah terjadi pada tahun 2010. Penelitian ini berfokus pada peran paguyuban dan lembaga adat dalam memelihara kerukunan melalui aktivitas sosial dan budaya, serta bagaimana kebijakan pemerintah mendukung integrasi

lintas etnis di kota tersebut. Temuan penelitian ini memperlihatkan bagaimana sinergi antara aktor-aktor lokal, seperti paguyuban, lembaga adat, dan pemerintah, dapat membangun model hubungan sosial yang inklusif di tengah keberagaman.

Kota Tarakan di Kalimantan Utara merupakan contoh yang signifikan dari hubungan multikultural dan antaretnis di Indonesia, terutama mengingat peran sentralnya sebagai kota transit yang menarik berbagai kelompok etnis dari seluruh Nusantara. Di Tarakan, kehidupan multietnis ini didukung oleh keberadaan masyarakat asli, yaitu suku Tidung, yang telah menunjukkan sikap keterbukaan terhadap para pendatang. Keharmonisan ini tercipta karena masyarakat Tidung, sebagai tuan rumah, melihat pendatang sebagai bagian dari “warga Tarakan” tanpa memandang asal etnis mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Hj. Wahab (58), seorang tokoh masyarakat Tidung, yang menggambarkan situasi ini dengan berkata,

“Tarakan ini banyak mereka ini (Letta). Tapi setelah itu Alhamdulillah, aman sudah tidak lagi saling ini (berkonflik), walaupun ada kejadian lagi tidak separah 2010. Jadi kalau orang Tidung ini, tidak banyak [jumlah penduduk], tapi disini kan Tidung semua (merujuk pada orang yang sudah lama tinggal di Tarakan dianggap bagian dari Tidung)” (wawancara 28 Oktober 2022).

Penduduk asli suku Tidung di Tarakan telah membentuk pola interaksi sosial yang mengedepankan toleransi, terutama karena status mereka sebagai kelompok minoritas dari segi jumlah. Seperti diungkapkan oleh penelitian (Mansouri & Lobo, 2020), keterbukaan dalam menerima kehadiran kelompok lain merupakan salah satu karakteristik masyarakat multikultural yang menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Multikulturalisme yang sehat menuntut adanya ruang bagi dialog, integrasi, dan toleransi antar kelompok etnis yang berbeda. Di Tarakan, keragaman ini diperkuat oleh karakter masyarakat Tidung yang terbuka dan memiliki nilai inklusif yang tinggi dalam interaksi sehari-hari. Pengaruh nilai-nilai sosial ini sejalan dengan pandangan (Rumahuru, 2021), yang menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menciptakan keharmonisan sosial di masyarakat majemuk dapat tercapai melalui penerapan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai di antara berbagai kelompok.

Keberadaan paguyuban dan lembaga adat juga memperkuat kerukunan antaretnis di Tarakan. Paguyuban seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP), dan Paguyuban Keluarga Warga Jawa (PAKUWAJA) berfungsi sebagai wadah yang tidak hanya memelihara identitas budaya, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial yang mempererat hubungan antar kelompok. Paguyuban di Tarakan tidak hanya merayakan tradisi masing-masing, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan lintas budaya seperti pawai Iraw Tenggayu yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki andil besar dalam menjaga stabilitas sosial melalui kebijakan yang mendukung peran lembaga adat. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan bahwa lembaga adat bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis. Dukungan ini memungkinkan lembaga adat seperti LATUP untuk memainkan peran penting dalam meredam ketegangan di masyarakat. Peraturan ini senantiasa beriringan dengan pandangan (Ismail, 2010) yang menekankan pentingnya peran lembaga lokal dalam mengatasi ketegangan antaretnis melalui pendekatan berbasis kearifan lokal.

Namun, dinamika multikultural di Tarakan bukan tanpa tantangan. Konflik antaretnis yang terjadi pada tahun 2010 menjadi pengingat akan pentingnya terus menguatkan dialog dan toleransi antar kelompok. (Fanselow, 2015). menunjukkan bahwa konflik etnis sering kali dipicu oleh perebutan sumber daya atau akses ekonomi yang tidak merata di masyarakat multikultural.

Walaupun konflik ini telah mereda, dampaknya masih meninggalkan jejak traumatis bagi sebagian masyarakat, khususnya di antara kelompok etnis Bugis dan Tidung. Berbagai paguyuban berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut, menunjukkan bahwa paguyuban berfungsi tidak hanya sebagai sarana interaksi budaya, tetapi juga sebagai perangkat resolusi konflik yang efektif.

Studi perbandingan dari Babussalam, Sumatera Utara, dan Desa Jatun, Minahasa, juga memberikan pandangan berharga tentang cara mempertahankan harmoni antaretnis di Tarakan. Tercatat bahwa di Babussalam, kerukunan terwujud melalui nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kegiatan sosial seperti acara kenduri dan kerja bakti bersama yang tidak hanya menjadi sarana interaksi sosial, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antar kelompok etnis (Fanny et al., 2022). Gotong royong dalam pembangunan fasilitas umum, ronda malam, serta pasar tradisional menciptakan ruang interaksi yang intens, sementara kenduri menjadi ajang pertemuan bagi berbagai kelompok etnis untuk berbagi dan mempererat solidaritas. Selain itu, peran kegiatan keagamaan bersama, seperti pengajian dan perayaan hari besar Islam, turut memperkuat ikatan sosial dan menekan potensi segregasi berbasis etnis.

Di Babussalam, kehidupan sosial yang terbuka dan fleksibel juga terlihat dari tingginya tingkat pernikahan lintas etnis, yang tidak hanya memperkuat hubungan antar kelompok, tetapi juga menciptakan generasi baru yang mampu menjembatani perbedaan budaya di antara komunitas. Fenomena kawin campur ini memperlihatkan adanya penerimaan yang tinggi terhadap keberagaman serta toleransi yang telah mengakar di masyarakat. Selain itu, bahasa juga menjadi alat penting dalam interaksi sosial, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang etnis terbiasa menggunakan bahasa Sunda sebagai lingua franca dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan warga untuk menguasai dan menggunakan bahasa di luar bahasa ibu mereka menunjukkan adanya proses adaptasi yang mendukung integrasi sosial tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing kelompok.

Pola serupa tampak di Tarakan, di mana masyarakat dari berbagai paguyuban turut berpartisipasi dalam acara-acara sosial dan perayaan bersama yang difasilitasi pemerintah untuk menciptakan ruang bagi interaksi antar etnis. Acara budaya seperti Iraw Tengkeyu bukan hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga wadah di mana masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi secara aktif. Paguyuban seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dengan mempertemukan kelompok-kelompok yang berbeda dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Seperti di Babussalam, praktik gotong royong dalam pembangunan fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, serta aktivitas ekonomi bersama juga menjadi bagian dari pola interaksi di Tarakan. Program-program berbasis komunitas yang mengedepankan kerja sama lintas etnis, seperti arisan, sistem ronda, dan kegiatan amal, menjadi alat yang memperkuat solidaritas dan memperkecil potensi konflik.

Interaksi yang terjalin dalam ruang-ruang sosial ini menunjukkan bahwa harmoni di Tarakan tidak hanya terbentuk secara alami, tetapi juga terus dikelola dan diperkuat melalui berbagai mekanisme sosial yang serupa dengan yang ditemukan di Babussalam. Keberhasilan kedua wilayah ini dalam menjaga kerukunan menunjukkan bahwa integrasi sosial bukan hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang-ruang bersama yang mendorong kerja sama dan saling memahami antar kelompok etnis.

Interaksi yang terjalin di antara kelompok-kelompok etnis di Tarakan, seperti antara masyarakat Tidung, Bugis, dan Jawa, menegaskan pentingnya “multikulturalisme yang dalam” atau *deep multiculturalism*, yang diperkenalkan oleh (Mansouri & Lobo, 2020). Konsep ini

menekankan perlunya keterlibatan mendalam, bukan hanya penerimaan dangkal, terhadap budaya lain, di mana dialog dan keterbukaan menjadi pondasi bagi interaksi sosial yang damai. Di Tarakan, multikulturalisme yang dalam ini diwujudkan melalui kegiatan bersama yang melibatkan seluruh etnis, seperti "Jumpa Pagi" yang diselenggarakan rutin setiap bulan, dengan dihadiri oleh perwakilan paguyuban, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi forum untuk berdialog secara langsung, berbagi pandangan, dan mendiskusikan solusi bersama untuk setiap masalah sosial yang muncul. Tarakan menunjukkan bagaimana berbagai kelompok etnis dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun pernah mengalami konflik. Dinamika ini menunjukkan bahwa keharmonisan antaretnis di kota ini tercipta bukan hanya melalui dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga berkat peran aktif paguyuban dan lembaga adat dalam mengedepankan nilai toleransi dan saling menghormati.

3.2 Paguyuban Sebagai Penopang Sosial Kerukunan Etnis

Di Kota Tarakan, paguyuban berperan sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menguatkan harmoni antaretnis di tengah keberagaman. Kota ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, termasuk Bugis, Tidung, Jawa, dan Tionghoa, yang membawa warisan budaya dan identitas tersendiri. Dengan keberagaman tersebut, paguyuban berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan dan merayakan identitas etnis sembari menjalin interaksi positif antar kelompok. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat sekitar 156 paguyuban aktif di Tarakan, masing-masing berperan dalam membangun jembatan sosial yang memfasilitasi integrasi dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat multikultural ini. Di antara berbagai paguyuban tersebut, beberapa yang memiliki peran signifikan dalam memelihara stabilitas dan harmoni sosial di Tarakan adalah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP), Paguyuban Keluarga Warga Jawa (PAKUWAJA), dan Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)

KKSS merupakan salah satu paguyuban terbesar yang mewadahi masyarakat Bugis di Tarakan. Selain menjadi ruang berkumpul bagi warga Bugis, KKSS juga berfungsi sebagai penghubung antara kelompok Bugis dengan kelompok etnis lainnya. Melalui berbagai kegiatan sosial, seperti acara donor darah, pertemuan arisan, dan pertemuan bulanan, KKSS menyediakan platform bagi masyarakat dari latar belakang etnis berbeda untuk berinteraksi secara positif. Aktivitas-aktivitas ini menciptakan ruang bagi anggota KKSS untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan kelompok lain, sekaligus mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya.

Peristiwa konflik 2010 menjadi pengalaman yang memperkuat peran KKSS sebagai mediator dalam menjaga perdamaian antaretnis. Saat konflik terjadi, KKSS berperan penting dalam mengurangi ketegangan melalui pendekatan dialog dan penyelesaian damai. Felsy (26), seorang anggota KKSS, menyatakan bahwa,

"Kalau kami ini dibilang dendam, ndada itu, dijadikan pelajaran saja. Kami sadar, konflik itu bisa datang kapan saja, tapi yang terpenting sekarang bagaimana menjaga situasi supaya tidak terulang. Sekarang Tarakan sudah aman, dan kami selalu ingatkan masyarakat, terutama anak muda, bahwa perbedaan bukan alasan untuk berkonflik. Malah harus jadi alasan untuk saling mengenal dan saling mendukung. KKSS rutin mengadakan kegiatan yang bisa mempertemukan berbagai kelompok, supaya masyarakat saling berbaur dan menghilangkan rasa curiga atau prasangka

buruk.” (wawancara 23 November 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman konflik tersebut telah memperkuat KKSS dalam mengemban peran mediasi dan perdamaian, khususnya melalui kegiatan yang memperlambat ikatan sosial antar kelompok etnis. Pandangan (Manan, 2018) juga mendukung peran ini, di mana ia menjelaskan bahwa interaksi sosial yang baik di lingkungan multikultural sangat bergantung pada inisiatif kelompok untuk menjaga hubungan sehat antar komunitas. Dengan mendorong keterlibatan komunitas yang beragam, KKSS mampu memperluas lingkup interaksi yang sehat dan menciptakan nilai persaudaraan yang lebih kuat di antara warganya.

Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP)

LATUP, sebagai lembaga adat yang mewakili masyarakat Tidung, memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya dan identitas etnis lokal di tengah kota multietnis seperti Tarakan. Sebagai etnis asli di Tarakan, LATUP tidak hanya berfokus pada pelestarian tradisi Tidung, tetapi juga mengadopsi pendekatan yang terbuka terhadap keberadaan etnis lain. Festival budaya seperti Iraw Tengkeyu, yang diadakan setiap dua tahun sekali, menjadi contoh nyata di mana seluruh masyarakat Tarakan, tanpa memandang asal-usul etnis, diundang untuk berpartisipasi. Acara ini memperkuat kohesi sosial dan berfungsi sebagai wadah inklusif bagi warga Tarakan untuk merayakan keberagaman di dalam kesatuan. Hj. Wahab (58), tokoh dari LATUP, memberikan pernyataan.

“Masyarakat Tidung menganggap pendatang sebagai bagian dari komunitas mereka sendiri, sebuah sikap yang mencerminkan keterbukaan dan penerimaan yang mendalam. Lembaga adat seperti LATUP memiliki peran penting dalam menciptakan kohesi sosial, di mana toleransi dan interaksi yang harmonis dapat terwujud melalui pendekatan berbasis budaya lokal” (wawancara 28 Oktober 2022).

Melalui pendekatan inklusif ini, LATUP menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi elemen penting dalam menghindari konflik, sebagaimana ditemukan dalam penelitian mengenai kohesi sosial di Babussalam, Sumatera Utara. Dalam komunitas multietnis seperti di Tarakan, pendekatan ini terbukti efektif dalam menguatkan hubungan sosial antar kelompok yang berbeda latar belakang budaya.

Paguyuban Keluarga Warga Jawa (PAKUWAJA)

PAKUWAJA menyediakan ruang bagi komunitas Jawa di Tarakan untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka, sembari tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial kota. Berbagai kegiatan budaya, seperti Tari Kuda Lumping dan Campursari, rutin diadakan sebagai upaya untuk mempertahankan warisan budaya Jawa sekaligus memperlambat hubungan dengan komunitas lain di Tarakan. Partisipasi PAKUWAJA dalam acara lintas budaya seperti pawai Iraw Tengkeyu menunjukkan komitmen komunitas ini untuk mendukung integrasi budaya dan menjaga hubungan harmonis dengan kelompok etnis lain. Menurut Tri (24), seorang anggota muda PAKUWAJA, konflik 2010 menjadi pengalaman yang memberi pelajaran berharga bagi masyarakat tentang pentingnya menghargai keberagaman dan menghindari prasangka.

“Konflik itu benar-benar membuka mata kami bahwa masalah kecil sekalipun bisa melebar luas. Padahal yang masalah satu doang, eh yang kena rombongan gitu. Itu membuat kami sadar bahwa kebersamaan dan saling menghormati itu sangat penting. Kami di paguyuban sekarang lebih giat mengadakan kegiatan bareng-

bareng, supaya tidak ada lagi kecurigaan antar komunitas. Setiap acara kami juga selalu terbuka bagi semua kelompok etnis, agar interaksi positif semakin terbangun dan prasangka negatif hilang perlahan-lahan" (wawancara 12 November 2022).

Ungkapannya, menggambarkan bagaimana konflik tersebut dapat memberikan dampak luas kepada seluruh komunitas jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini mendukung pandangan (Rais, 2012). yang menekankan bahwa interaksi sosial yang intensif dan positif dapat mengurangi potensi perselisihan di masyarakat multikultural.

Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)

Sebagai perwakilan komunitas Tionghoa di Tarakan, PSMTI memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di kota ini. Di samping mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, PSMTI juga terlibat dalam kegiatan amal yang membantu masyarakat luas. Selama pandemi COVID-19, PSMTI mendistribusikan bantuan sembako bagi warga yang terkena dampak, menunjukkan kepedulian dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan sosial.

Meski komunitas Tionghoa tidak terlibat langsung dalam konflik 2010, pengalaman tersebut meninggalkan rasa waspada. Monmon, salah satu anggota PSMTI, menyebutkan bahwa peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terulangnya konflik. "Tarakan betul-betul seperti kota mati... sampai sekarang keluarga kami masih merasa takut akan kejadian serupa," ungkapnya, mencerminkan trauma yang masih dialami sebagian masyarakat. Penelitian (Fanselow, 2015) menyoroti bahwa paguyuban (seperti PSMTI) dapat memainkan peran penting dalam membangun rasa saling percaya antar kelompok serta mencegah ketegangan melalui interaksi sosial yang saling mendukung dan mendorong toleransi.

Bagi komunitas Tionghoa di Tarakan, konflik etnis bukan hanya dimaknai sebagai bentrokan antar individu atau kelompok, tetapi juga sebagai dampak dari ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang menciptakan ketegangan di masyarakat. Sebagaimana dipahami oleh banyak warga lokal, konflik sering kali muncul bukan semata karena perbedaan identitas, tetapi juga karena perasaan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya atau kesempatan ekonomi. Dalam konteks ini, PSMTI menyadari bahwa harmoni sosial hanya dapat terjaga jika terdapat ruang interaksi yang memungkinkan kelompok-kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara setara dan tanpa rasa curiga.

Sebagai respons terhadap pemahaman tersebut, PSMTI aktif mendorong keterlibatan komunitas Tionghoa dalam berbagai kegiatan sosial yang memperkuat jalinan antar kelompok. Selain mendukung ekonomi masyarakat melalui sektor perdagangan, PSMTI juga mengadakan program sosial yang bertujuan mempererat hubungan antar etnis, seperti kerja sama dengan paguyuban lain dalam kegiatan amal, perayaan budaya, serta inisiatif sosial seperti gotong royong dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Program-program ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan dan solidaritas, tetapi juga memastikan bahwa komunitas Tionghoa di Tarakan terlibat aktif dalam proses integrasi sosial di tengah masyarakat yang lebih luas.

Pemahaman warga lokal tentang konflik juga memperkuat peran paguyuban sebagai wadah untuk mengelola ketegangan sosial dan memperkuat jaringan sosial yang inklusif. Seperti yang terlihat di komunitas Bugis dan Tidung, masyarakat Tionghoa melalui PSMTI juga menggunakan mekanisme sosial yang memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih baik antar kelompok. Dengan menyediakan ruang interaksi yang lebih terstruktur, seperti dalam pertemuan lintas paguyuban dan acara budaya bersama, PSMTI menjadi salah satu elemen penting dalam strategi pemeliharaan kerukunan di Tarakan.

Secara keseluruhan, paguyuban di Tarakan tidak hanya berperan dalam merawat identitas budaya, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga harmoni antaretnis dan mencegah konflik. Paguyuban seperti KKSS, LATUP, PAKUWAJA, dan PSMTI tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan solidaritas antaretnis. Ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang etnis terlibat secara aktif, baik dalam kegiatan budaya maupun sosial yang diadakan secara rutin.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan Ginting et al. (2020) yang menekankan pentingnya kesediaan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunal untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat multikultural. Menurut Ginting et al. (2020), "interaksi antaretnis yang dipupuk dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan budaya dan sosial dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa saling percaya." Dengan demikian, paguyuban tidak hanya menjadi wadah untuk berkumpul, tetapi juga sebagai penopang kerukunan yang menumbuhkan nilai-nilai toleransi.

Dengan memahami bagaimana konflik etnis dipersepsikan oleh masyarakat serta bagaimana interaksi sosial yang inklusif dapat mengatasi prasangka, PSMTI dan paguyuban lainnya di Tarakan terus berupaya membangun ruang sosial yang dapat menjadi jembatan antaretnis. Kesadaran bahwa stabilitas sosial hanya dapat dijaga melalui keterlibatan aktif dalam komunitas multietnis menjadikan paguyuban sebagai elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh masyarakat Tarakan.

Secara keseluruhan, paguyuban di Tarakan tidak hanya berperan dalam merawat identitas budaya, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga harmoni antaretnis dan mencegah konflik. Paguyuban seperti KKSS, LATUP, PAKUWAJA, dan PSMTI tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan solidaritas antaretnis. Ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang etnis terlibat secara aktif, baik dalam kegiatan budaya maupun sosial yang diadakan secara rutin.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Ginting et al., 2020) yang menekankan pentingnya kesediaan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunal untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat multikultural. Menurut (Ginting et al., 2020) "interaksi antaretnis yang dipupuk dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan budaya dan sosial dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa saling percaya." Dengan demikian, paguyuban tidak hanya menjadi wadah untuk berkumpul, tetapi juga sebagai penopang kerukunan yang menumbuhkan nilai-nilai toleransi.

3.3 Konflik 2010 dan Memori Kolektif Masyarakat Tarakan

Dalam konteks antropologi budaya, (Kyrou & Rubinstein, 2008) menjelaskan bahwa konflik sering kali tidak hanya tentang ketidakcocokan langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh simbolisme dan norma budaya yang membentuk bagaimana suatu masyarakat merespons ketegangan. Simbolisme konflik terlihat dalam cara masyarakat Tarakan mengartikulasikan pengalaman kolektif mereka, yang tercermin dalam ritual lokal seperti festival Iraw Tengkeyu. Festival ini, meskipun mengedepankan budaya Tidung, menciptakan ruang inklusif bagi partisipasi lintas etnis, menggambarkan bagaimana simbol budaya dapat menjadi instrumen rekonsiliasi.

Dalam konteks Tarakan, budaya Tidung memiliki peran sentral dalam membangun harmoni sosial, salah satunya melalui festival Iraw Tengkeyu. Festival ini bukan sekadar perayaan budaya yang berakar dalam tradisi masyarakat Tidung, tetapi juga sebuah mekanisme

sosial yang memungkinkan partisipasi lintas etnis, menjadikannya instrumen rekonsiliasi yang efektif. Potensi inklusivitas budaya Tidung dalam festival ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang memperlihatkan bagaimana simbolisme budaya digunakan untuk memperkuat hubungan sosial di masyarakat multietnis Tarakan.

Salah satu elemen utama dari Iraw Tengkyu adalah prosesi persembahan perahu Padaw Tuju Dulung yang dilakukan di laut. Dalam tradisi Tidung, perahu ini melambangkan harapan akan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, yang menarik adalah bahwa dalam pelaksanaannya, festival ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Tidung, tetapi juga mendapat dukungan luas dari komunitas etnis lain seperti Bugis, Banjar, Jawa, dan Tionghoa. Keterlibatan lintas etnis dalam festival ini mencerminkan bagaimana budaya Tidung membuka ruang bagi interaksi sosial yang lebih luas, memungkinkan kelompok-kelompok etnis di Tarakan untuk berbagi pengalaman dan membentuk solidaritas baru.

Selain prosesi utama, festival Iraw Tengkyu juga diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang berasal dari berbagai komunitas di Tarakan. Tarian tradisional yang ditampilkan tidak hanya berasal dari kebudayaan Tidung, tetapi juga mencakup tarian Bugis, Banjar, Dayak, dan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun festival ini berakar dalam identitas Tidung, penyelenggaraannya telah berkembang menjadi wadah yang mengakomodasi ekspresi budaya dari kelompok-kelompok lain. Dengan demikian, festival ini menciptakan sebuah narasi inklusif bahwa keberagaman budaya bukanlah hambatan, melainkan sumber kekayaan bersama yang memperkuat identitas sosial masyarakat Tarakan.

Potensi inklusivitas budaya Tidung juga terlihat dalam peran yang dimainkan oleh paguyuban etnis dalam festival ini. Misalnya, komunitas Bugis dan Banjar sering berpartisipasi dalam acara adat yang menyertai festival, seperti pawai budaya dan penyajian kuliner tradisional. Keberadaan berbagai elemen budaya dalam satu perayaan besar ini memperlihatkan bahwa simbolisme budaya dapat dijadikan alat untuk membangun pemahaman bersama antar kelompok yang sebelumnya mungkin memiliki ketegangan sejarah.

Selain sebagai ajang rekonsiliasi sosial, Iraw Tengkyu juga memperkuat ekonomi lokal dengan membuka peluang bagi interaksi ekonomi lintas etnis. Pasar budaya yang diadakan dalam rangkaian festival tidak hanya menampilkan produk-produk khas Tidung, tetapi juga berbagai hasil kerajinan dan kuliner dari komunitas lain. Interaksi dalam ruang ekonomi ini menciptakan hubungan saling menguntungkan yang dapat memperkuat kerja sama antaretnis dalam jangka panjang.

Pendekatan terhadap konflik antaretnis dapat dipahami melalui teori identitas sosial dan konflik etnis. Menurut (Arcan, 2014), konflik etnis sering kali mencerminkan ketegangan antara kelompok dominan dan subordinat terkait distribusi sumber daya dan pengakuan identitas. Dalam kasus Tarakan, konflik ini mencerminkan perjuangan untuk memaknai kembali hubungan sosial di tengah trauma kolektif. Peran organisasi seperti KKSS, LATUP, dan PAKUWAJA mencerminkan upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut melalui dialog lintas budaya dan kegiatan sosial.

Konflik antaretnis yang terjadi pada tahun 2010 di Kota Tarakan telah menjadi bagian integral dari memori kolektif masyarakat, terutama bagi komunitas Bugis Letta dan Tidung. Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan trauma yang membekas hingga kini, tetapi juga menjadi refleksi penting dalam hubungan sosial lintas etnis di Tarakan. Menurut (Widiastuti, 2015), memori kolektif menciptakan ikatan emosional pada kelompok yang terkena dampak yang berpengaruh terhadap interaksi sosial jangka panjang dan turut mewarnai dinamika kerukunan antar kelompok di masyarakat multikultural. Konflik ini menjadi "luka sosial" yang diwariskan antargenerasi, tetapi masyarakat memaknainya sebagai pelajaran penting untuk membangun

toleransi dan menghindari konflik serupa di masa depan. Pernyataan Arafah (29), seorang warga Bugis Letta, menggambarkan bagaimana generasi muda memahami trauma masa lalu sebagai pengingat untuk menjaga keharmonisan. Ia menuturkan,

"...kalau orang-orang tua tu dek bukan dia mau dia cerita tentang ini ni, bukan dendam sih mereka cuma kayak luka gitu nah dek. Tapi kitani yang anak muda gitu kita jadiin pelajaran aja kan, ndalah mau dibuat dendam walaupun ada beberapa keluarga kakakni yang jadi korban. Kita tuh berpikir, jangan sampai kejadian yang lalu terjadi lagi, jadi kita aktif ikut kegiatan paguyuban, saling mengenal budaya masing-masing, biar gak gampang tersulut lagi. Kita ingin generasi sekarang lebih paham pentingnya toleransi, saling menghargai, supaya Tarakan tetap damai, ndak ada lagi peristiwa yang menyakitkan seperti dulu." (wawancara 23 November 2022).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa generasi muda berusaha memaknai pengalaman traumatis ini bukan untuk melanggengkan dendam, tetapi untuk belajar menjaga persatuan dan saling menghormati meskipun pernah terjadi konflik. Dalam konteks pemulihan pascakonflik, peran paguyuban-paguyuban lokal sangat signifikan dalam menjaga harmoni dan membangun kembali kepercayaan antaretnis. Organisasi seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP) berperan penting sebagai mediator antar kelompok dan berupaya mengurangi ketegangan yang ada. KKSS, misalnya, aktif melakukan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, seperti arisan, pertemuan bulanan, dan acara donor darah yang melibatkan komunitas etnis lain. Penelitian oleh (Ismail, 2010). mendukung pentingnya peran paguyuban sebagai pengikat sosial yang dapat memperkuat rasa kohesi dan solidaritas di antara masyarakat multikultural.

LATUP, sebagai lembaga adat yang mewakili masyarakat Tidung, juga mengedepankan pendekatan inklusif untuk merangkul berbagai etnis di Tarakan. Melalui acara budaya seperti festival Iraw Tengkeyu, yang diadakan setiap dua tahun, LATUP mengundang seluruh masyarakat untuk merayakan budaya Tidung. Festival ini menjadi simbol persatuan, di mana masyarakat dari berbagai etnis berpartisipasi tanpa memandang asal-usul mereka. Iraw Tengkeyu menciptakan ruang bersama yang memperkuat kerukunan dan menumbuhkan rasa saling menghormati antarbudaya. Praktik budaya lokal semacam ini berperan penting dalam menguatkan hubungan sosial di masyarakat yang beragam.

Selain itu, Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang mewakili komunitas Tionghoa di Tarakan juga terpengaruh oleh konflik ini, meskipun mereka tidak menjadi pihak yang terlibat langsung. Monmon (24), salah satu anggota PSMTI, menggambarkan bahwa konflik tersebut menyebabkan kekhawatiran di kalangan komunitas Tionghoa, terutama karena kegiatan bisnis dan sosial mereka terganggu.

"Tarakan betul-betul seperti kota mati waktu konflik terjadi. Semua usaha tutup, dan masyarakat merasa takut untuk keluar rumah. Walaupun kami tidak terlibat langsung, dampaknya sangat terasa buat komunitas Tionghoa. Sampai sekarang keluarga kami masih merasa takut akan kejadian serupa. Kami jadi lebih waspada, lebih menjaga hubungan baik antar komunitas supaya jangan sampai konflik itu terjadi lagi. Sekarang di PSMTI, kami aktif ikut kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok etnis supaya bisa saling kenal dan saling percaya. Tapi terus terang saja, trauma itu masih ada, terutama di kalangan orang-orang tua." (wawancara 28 November 2022).

Ungkap Monmon, menunjukkan perasaan cemas yang tetap ada di kalangan minoritas. Masyarakat minoritas yang pernah mengalami dampak konflik sosial sering kali memperkuat ikatan internal mereka untuk mengurangi ketegangan yang mungkin muncul kembali di masa depan (Fanani et al., 2018). Peran paguyuban sebagai agen pemulihan pascakonflik mencerminkan pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi stabilitas sosial. Menurut (Rais, 2012) nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh paguyuban dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah eskalasi konflik di masa depan. Hal ini terlihat dalam program-program sosial yang dijalankan oleh KKSS, LATUP, dan PAKUWAJA yang berhasil menciptakan atmosfer positif yang mendorong inklusivitas dan saling menghormati di antara anggota masyarakat.

Lebih lanjut, KKSS berperan dalam memediasi berbagai permasalahan sosial melalui pendekatan yang berbasis pada kesetaraan dan keterbukaan. Sebagai paguyuban yang beranggotakan masyarakat Bugis, KKSS mendorong adanya pertemuan rutin dan berbagai acara sosial, termasuk arisan yang tidak hanya dihadiri oleh etnis Bugis tetapi juga terbuka untuk kelompok lain. Hal ini sesuai dengan teori sosial yang dikemukakan (Manan, 2018), yang menyatakan bahwa hubungan sosial di lingkungan multikultural dapat dikelola melalui partisipasi aktif dalam kegiatan bersama.

LATUP, selain menyelenggarakan acara budaya yang inklusif, juga mendorong dialog terbuka untuk mencegah kesalahpahaman dan prasangka antaretnis. Dengan mengundang berbagai kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat, LATUP berupaya menanamkan rasa persaudaraan tanpa memandang perbedaan etnis. Hj. Wahab (58), menegaskan.

“Orang Tidung menyambut baik kehadiran pendatang dan melihat mereka sebagai bagian dari komunitas Tarakan. Kita tidak pernah memandang dari mana asal mereka, selama mereka mau bergabung, kita anggap mereka adalah bagian dari keluarga besar kami di sini. Budaya Tidung memang mengajarkan kita untuk terbuka, menghormati, dan hidup berdampingan dengan siapa saja yang datang dengan niat baik. Oleh karena itu, kami sering mengadakan kegiatan budaya seperti Iraw Tengkeyu yang memang sengaja kami buka luas untuk semua warga Tarakan, agar rasa persaudaraan terus terjaga” (wawancara 24 November 2022).

Pandangan ini selaras dengan temuan penelitian oleh (Paramita dan Sari, 2016), yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam interaksi antarbudaya untuk menghindari konflik dan mendorong integrasi sosial. Memori kolektif konflik 2010 juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya mencegah konflik dengan menghindari prasangka. Seperti yang diungkapkan oleh Tri (24), seorang anggota muda PAKUWAJA,

“Konflik 2010 itu memang sangat mengejutkan. Padahal yang masalah satu doang, eh yang kena rombongan gitu. Semua jadi kena dampaknya, bahkan mereka yang sama sekali tidak terlibat. Ini menjadi pelajaran berharga buat kami, terutama generasi muda, supaya tidak gampang termakan isu atau prasangka negatif. Sekarang, kami rutin mengadakan kegiatan lintas budaya, biar kami saling kenal, saling memahami, dan saling menghormati. Kami sadar, kalau hubungan sosial intensif dan komunikasi terbuka antar komunitas bisa menjaga Tarakan tetap damai dan terhindar dari konflik serupa.” (wawancara 27 November 2022).

Ini menandakan bagaimana konflik berdampak luas pada seluruh komunitas dan dapat

berulang jika tidak dikelola dengan baik. Ini mendukung pandangan (Rais, 2012). yang menyebutkan bahwa hubungan sosial yang intensif melalui kegiatan budaya dan sosial dapat memperkuat persaudaraan dan mengurangi potensi perselisihan di masyarakat.

Ingatan bersama tentang konflik 2010 telah memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga harmoni sosial di Tarakan. Paguyuban-paguyuban lokal memainkan peran sentral dalam memperkuat jaringan sosial yang mencakup berbagai etnis. Dengan mengadakan acara budaya dan kegiatan sosial secara rutin, masyarakat Tarakan tidak hanya menjaga hubungan baik, tetapi juga terus belajar dari pengalaman masa lalu untuk menghindari konflik serupa di masa depan.

4. Simpulan

Penelitian Penelitian ini menegaskan bahwa paguyuban lokal memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memulihkan harmoni antaretnis di Kota Tarakan pasca-konflik tahun 2010. Paguyuban seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP), Paguyuban Keluarga Warga Jawa (PAKUWAJA), dan Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) berfungsi sebagai mediator dalam meredakan ketegangan sosial, mengelola memori kolektif tentang konflik, serta memfasilitasi interaksi lintas budaya yang memperkuat inklusivitas dan kepercayaan antaretnis. Keberadaan paguyuban tidak hanya menjadi wadah bagi masing-masing kelompok etnis untuk mempertahankan identitas budayanya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan aktif dalam membangun hubungan harmonis di tengah keberagaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh paguyuban dalam mencegah konflik dan membangun harmoni sosial meliputi tiga aspek utama: (1) fasilitasi interaksi lintas budaya, (2) pengelolaan trauma kolektif, dan (3) sinergi dengan kebijakan pemerintah. Berbagai kegiatan sosial, seperti festival budaya, pertemuan lintas paguyuban, gotong royong, serta perayaan keagamaan, telah membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan ruang interaksi positif antar kelompok. Paguyuban juga berperan dalam mengelola trauma kolektif yang masih membekas akibat konflik, dengan memanfaatkan memori konflik sebagai pelajaran untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian. Selain itu, peran kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020, semakin memperkuat peran paguyuban dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa memori kolektif dalam masyarakat Tarakan tidak hanya mencakup pengalaman traumatis akibat konflik, tetapi juga berakar dalam mitos dan legenda yang memperkuat identitas kolektif dan rasa persaudaraan. Cara masyarakat Tarakan mengelola hubungan antar kelompok melalui mekanisme adat dan kebersamaan dapat dilihat dalam aktivitas kebudayaan seperti Festival Iraw Tengkeyu. Meskipun berakar dalam budaya Tidung, Iraw Tengkeyu telah berkembang menjadi ruang inklusif yang memungkinkan partisipasi lintas etnis dan berfungsi sebagai simbol rekonsiliasi. Implikasi dari penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan lokal dan interaksi sosial yang intens dapat menjadi model dalam mencegah dan mengelola konflik di masyarakat multikultural lainnya. Dukungan dari pemerintah dalam memperkuat peran paguyuban melalui kebijakan yang responsif, fasilitasi dialog lintas budaya, serta program sosial berbasis komunitas menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas sosial di Tarakan.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penerapan model paguyuban di daerah multietnis lain dengan karakteristik konflik serupa serta menganalisis

bagaimana struktur dan fungsi paguyuban dapat beradaptasi dalam menyelesaikan konflik sosial di berbagai konteks masyarakat multikultural. Kajian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari strategi yang telah diterapkan, serta bagaimana generasi muda dalam komunitas multi-etnis dapat lebih berperan dalam menjaga harmoni sosial di masa depan.

Referensi

- Arcan, H. E. (2014). Ethnic Identities and Conflict: Ethnic Conflict Prevention Approach of The European Union. *Journal of Educational and Social Research*, 4(1), 27–35. doi:[10.5901/jesr.2014.v4n1p27](https://doi.org/10.5901/jesr.2014.v4n1p27)
- Creswell, John. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fanny, N. M., Husda, H., & Munawiah. (2022). Harmony between Javanese, Sundanese, and Batak Ethnicities in Babussalam Village, Marbau Sub-District, North Labuhan Batu Regency. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 3(2), 79-101. doi:[10.22373/ijihc.v3i2.1980](https://doi.org/10.22373/ijihc.v3i2.1980)
- Fanselow, F. (2015). Indigenous and Anthropological Theories of Ethnic Conflict in Kalimantan. *ZINBUN*, 45, 131-147. doi:[10.14989/197513](https://doi.org/10.14989/197513)
- Ginting, J. S., Sumarno, E., Karina, N., & Lubis, M. A. R. (2020). Banjar-Jowo-Karo (BAJOKA): The tolerance and harmony between three ethnicities in Paya Itik Village, Galang District, Deli Serdang Regency. *TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 3(4). doi:[10.32734/LWSA.V3I4.1139](https://doi.org/10.32734/LWSA.V3I4.1139)
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama: Fenomena Keagamaan Di Jawa Tengah, Bali, Dan Kalimantan Barat. *Jurnal Analisa*, 17(2), 175-186. doi:[10.18784/analisa.v17i2.36](https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.36)
- Kymlicka, W. (2002). Multiculturalism and Minority Rights: West and East. *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe*.
- Kymlicka, W. (2010). The Rise and Fall of Multiculturalism? New Debates on Inclusion and Accommodation in Diverse Societies. *International Social Science Journal*, 199, 97-113.
- Kyrou, C., & Rubinstein, R. A. (2008). Cultural Anthropology: Studies of Conflict. In R. A. Rubinstein & M. E. Foster (Eds.), *The Anthropology of Peace and Conflict*. New Haven: Yale University Press.
- Lestari, D. T., & Parihala, Y. (2020). Merawat Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 43-54. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i1.8697>
- Majid, A. N., & Amalina, D. (2020). Religious Socially Based Harmony Education in Tanèan Lanjâng Society. In *Proceeding of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS)*, 117-130. Madura: IAIN Madura.
- Manan, M. A. (2018). Kerukunan Berlandaskan Tradisi dan Toleransi Keberagamaan: Pembelajaran dari Komunitas Desa Probur Utara, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20(1), 105–117. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI. doi:[10.14203/JMB.V20I1.563](https://doi.org/10.14203/JMB.V20I1.563)
- Mansouri, F., & Lobo, M. (2010). Intercultural Harmony and Understanding in the City of Whittlesea. Deakin University.
- Marta, R. F., & Fernando, J. (2020). Dialectics of Forgiveness between Ethnic Communities for West Kalimantan Harmony. *The Messenger*.12(1), 1-13. doi:[10.26623/themessenger.v12i1.1408](https://doi.org/10.26623/themessenger.v12i1.1408)

- Rachmadhani, A. (2018). Dimensi Etnik dalam Kerukunan Umat Beragama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Panangkaran*, 2(1), 1-10. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. [doi:10.14421/PANANGKARAN.2018.0201-01](https://doi.org/10.14421/PANANGKARAN.2018.0201-01)
- Rais, M. (2012). Index of Harmony Inter-Religious Communities in East Kalimantan. *Analisa*, 19(2), 189-195. [doi: 10.18784/analisa.v19i2.165](https://doi.org/10.18784/analisa.v19i2.165)
- Rumahuru, Y. Z., & Gaspersz, A. C. W. (2021). Community Based Diversity Management: Analysis of Community Activities Building Post-Conflict Social Harmony in Tual, Maluku Province, Indonesia. *Humaniora*, 33(1), 39-49. [doi:10.22146/jh.56933](https://doi.org/10.22146/jh.56933)
- Spradley, James P. (1979). *The Ethnographic Interview*. Belmont, California: Wadsworth Group.
- Sutanti, S. (2020). Dinamika Konflik Antar Etnis Dayak dan Madura di Samalantan, Kalimantan Barat. *Jurnal Demokrasi dan Sosial Budaya*, 2(1), 90-95. [doi: 10.37950/ijd.v2i1.35](https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.35)
- Windiani, W., dan Rahmawati, F. N. (2016). Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(2):87-92. [10.21107/djs.v9i2.3747](https://doi.org/10.21107/djs.v9i2.3747)